

PENGARUH PERENCANAAN ANGGARAN TERHADAP PENYERAPAN ANGGARAN DI LINGKUNGAN INIVERSITAS SAM RATULANGI

Wieske Anneleen Ratag¹, Anderson G. Kumenaung², Daisy S.M. Engka³

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Magister Ilmu Ekonomi
Universitas Sam Ratulangi

ABSTRAK

Penganggaran merupakan suatu unsur atau bagian penting dalam sebuah perencanaan yang dibuat suatu entitas melalui tahap formulasi strategis terhadap alokasi sumber daya sebagai upaya pencapaian tujuan yang tergambar dalam visi dan misi suatu organisasi atau perusahaan. Anggaran dapat digunakan sebagai alat perencanaan biaya dan pendapatan, komunikasi, motivasi, serta sebagai alat pengendali bagi atasan (*superior*) kepada bawahannya (*subordinates*). Perencanaan menjadi faktor yang mempengaruhi serapan anggaran karena masih adanya anggapan bahwa tidak semua anggaran yang diusulkan akan disetujui, sehingga anggaran yang diusulkan lebih besar dari yang dibutuhkan tanpa memperhatikan kebutuhan riil di lapangan dan kemudahan dalam implementasinya. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis bagaimana pengaruh belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal terhadap penyerapan anggaran DIPA. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anggaran belanja pegawai berpengaruh positif dan signifikan secara statistik terhadap penyerapan anggaran DIPA. Begitu juga dengan belanja barang yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran DIPA. Belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran DIPA

Kata Kunci: *Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal dan Anggaran DIPA*

ABSTRACT

Budgeting is an important element or part of a plan made by an entity through the stage of strategic formulation of the allocation of resources as an effort to achieve the goals reflected in the vision and mission of an organization or company. The budget can be used as a cost and income planning tool, communication, motivation, and as a controlling tool for superiors (superior) to subordinates (subordinates). Planning is a factor that influences budget absorption because there is still an assumption that not all proposed budgets will be approved, so that the proposed budget is bigger than needed without regard to real needs in the field and ease of implementation. The purpose of this study is to analyze how the influence of employee spending, goods expenditure and capital expenditure on the absorption of the DIPA budget. The analysis technique used is multiple regression analysis. The research results show that the employee budget has a positive and statistically significant effect on the absorption of the DIPA budget. Likewise, the expenditure of goods has a positive and significant effect on the absorption of the DIPA budget. Capital expenditure has a positive and significant effect on the absorption of the DIPA budget

Keywords: *Employee Expenditures, Goods Expenditures, Capital Expenditures and DIPA Budget*

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Penganggaran merupakan suatu unsur atau bagian penting dalam sebuah perencanaan yang dibuat suatu entitas melalui tahap formulasi strategis terhadap alokasi sumber daya sebagai upaya pencapaian tujuan yang tergambar dalam visi dan misi suatu organisasi atau perusahaan. Anggaran dapat digunakan sebagai alat perencanaan biaya dan pendapatan, komunikasi, motivasi, serta sebagai alat pengendali bagi atasan (*superior*) kepada bawahannya (*subordinates*)

Menurut Munandar (2010:1), "Anggaran yaitu suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan yang dinyatakan dalam unit kesatuan moneter yang berlaku untuk jangka waktu periode tertentu yang akan datang". Menurut Nafarin (2011:11), mendefinisikan bahwa "Anggaran (*budget*) merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang, tetapi dapat juga dinyatakan dalam satuan barang/jasa".

Anggaran merupakan komponen penting dalam sebuah organisasi, baik organisasi sektor swasta maupun organisasi sektor publik. Menurut Hansen dan Mowen (2004:1), Setiap entitas pencari laba ataupun nirlaba bisa mendapatkan manfaat dari perencanaan dan pengendalian yang diberikan oleh anggaran. Perencanaan dan pengendalian merupakan dua hal yang saling berhubungan.

Anggaran belanja merupakan hal yang sangat penting dalam keberlangsungan sebuah negara. Dan anggaran belanja digunakan sebagai alat kebijakan di bidang fiskal disamping fungsinya untuk membiayai kegiatan-kegiatan pemerintah. Belanja pemerintah digunakan sebagai pendorong perekonomian secara agregat disaat perekonomian sedang lesu dan sektor privat tidak mampu berjalan dengan semestinya,. Belanja pemerintah tersebut tertuang dalam Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (APBN). APBN merupakan instrumen kebijakan fiskal dan berfungsi sebagai bentuk intervensi pemerintah yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi. Pemerintah juga telah mengambil langkah strategis melalui berbagai pendekatan fleksibilitas maupun mengurangi jalur birokrasi untuk mengoptimalkan tingkat realisasi penyerapan anggaran pada kementerian/lembaga. Dengan langkah tersebut diharapkan belanja APBN dapat lebih berdampak terhadap perekonomian khususnya pada sektor riil, sehingga APBN dapat lebih tercermin sebagai fungsi stabilisasi dan distribusi.

Belanja pemerintah pusat yang ada dalam struktur APBN dirinci menjadi beberapa jenis belanja dalam DIPA, dan memainkan peranan yang sangat penting dalam pencapaian realisasi anggaran Kementerian /Lembaga. Besaran dan komposisi anggaran belanja pemerintah pusat dalam operasi fiskal pemerintah mempunyai dampak yang signifikan pada permintaan *agregat* dan output pada Kementerian/Lembaga, serta mempengaruhi alokasi sumberdaya dalam perekonomian. Besaran belanja pemerintah pusat terus meningkat dari tahun ke tahun.

Perencanaan menjadi faktor yang mempengaruhi serapan anggaran karena masih adanya anggapan bahwa tidak semua anggaran yang diusulkan akan disetujui, sehingga anggaran yang diusulkan lebih besar dari yang dibutuhkan tanpa memperhatikan kebutuhan riil di lapangan dan kemudahan dalam implementasinya. Perencanaan anggaran yang tidak akurat juga mengakibatkan Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) harus dilakukan revisi, sebelum pelaksanaan. Revisi DIPA tersebut menyebabkan jadwal kegiatan harus dilakukan penyesuaian, dan waktu pelaksanaan menjadi mundur. Kegiatan dan program juga belum dapat dilaksanakan sebelum persetujuan revisi DIPA tersebut disahkan, karena kegiatan dan program tersebut dapat dikategorikan belum ada alokasi anggaran. Sesuai pasal 3 ayat (3) Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia.

Penyerapan anggaran juga akan mengalami keterlambatan bila perencanaan kegiatan kurang matang dan pelaksanaan kegiatan dilakukan tidak sesuai perencanaannya. Perencanaan anggaran yang akurat akan memudahkan tahap pelaksanaan anggaran dan memungkinkan tercapainya target secara efektif. Sebaliknya, ketidaktepatan dalam perencanaan anggaran mengakibatkan sulitnya pelaksanaan anggaran yang berdampak pada lambatnya proses penyerapan dan pertanggungjawaban anggaran.

Pendapat tersebut sejalan dengan penelitian Hendris Heriyanto (2012) yang menunjukkan hasil bahwa perencanaan yang tidak matang mengakibatkan penyerapan anggaran tidak maksimal.

Hal lain, disamping perencanaan anggaran yang dapat mempengaruhi penyerapan anggaran adalah pelaksanaan anggaran. Menurut Suryoprato (2010) “kesenjangan antara perencanaan dan pelaksanaan merupakan persoalan yang sering dihadapi dalam pelaksanaan anggaran, akibatnya anggaran yang telah disahkan tidak selalu dapat terpakai dan tidak terserap dalam program yang sudah ditetapkan”. Dalam pelaksanaan anggaran, lambatnya penyerapan anggaran juga dipengaruhi oleh beberapa faktor: pertama, persoalan yang terjadi dalam internal satuan kerja seperti: lambatnya penunjukan tenaga pengelola keuangan, kebiasaan menunda pekerjaan dan tidak adanya mekanisme *reward* dan *punishment* dalam pengelolaan anggaran satuan kerja (Miliasih, 2012). Kedua, proses pengadaan barang/jasa. Kehati-hatian pejabat pengadaan barang/jasa dalam mengambil tindakan dalam proses pengadaan barang/jasa, keengganan pegawai ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdampak terhadap lambatnya penyerapan anggaran. Ketiga, mekanisme pembayaran (pencairan anggaran). Pasal 21 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan “Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima” Ketentuan ini menegaskan bahwa persyaratan utama dapat dilakukan pembayaran adalah telah diterimanya barang dan/atau jasa yang diperjanjikan antara PPK dan penyedia barang/jasa. Namun kadang kala pembayaran kepada pihak penyedia barang/jasa juga mengalami kelambatan. Tunggal (2011) menyatakan bahwa keterlambatan pembayaran kepada pihak penyedia barang/jasa dapat juga disebabkan karena pihak penyedia tidak mengajukan tagihan atau karena dokumen bukti tagihan yang diserahkan pihak penyedia tidak lengkap. Selain itu, perencanaan kas yang tidak akurat, mengakibatkan satuan kerja tidak memiliki pedoman yang tepat kapan anggaran akan direalisasikan, sehingga proses pencairan anggaran menjadi terlambat (Septianova dan Adam, 2013). Hal ini sesuai dengan penelitian Kuswoyo (2011) yang menyatakan bahwa lambatnya pelaksanaan anggaran menjadi penyebab terjadinya penumpukan belanja di akhir tahun anggaran.

Dalam mencapai tujuannya diperlukan perencanaan dan pengawasan yang baik. Untuk itu perlu menyusun suatu anggaran. Anggaran merupakan titik fokus dari keseluruhan proses perencanaan dan pengawasan. Oleh karena itu, anggaran harus terorganisasi, rapi, jelas, komperhensif serta disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan pada saat ini. Anggaran sebagai alat manajemen dibidang perencanaan dan pengawasan ternyata tidak begitu saja dapat diperoleh manfaatnya secara penuh dan berimbang oleh Kementerian/Lembaga yang telah menggunakannya tanpa ada usaha khusus dengan persyaratan tertentu yang harus dipenuhi. Penganggaran tidak lain adalah proses menentukan siapa yang bertanggung jawab (Adisaputro, 2003:5). Perencanaan yang baik bukan saja harus mempunyai tujuan dan konsistensi, tetapi juga harus dilakukan pengawasan secara terus menerus. Perencanaan pasti mengharapkan bahwa apa yang direncanakan itu dapat memenuhi sasaran dalam waktu dan biaya yang telah tentukan. Salah satu langkah strategis untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan anggaran dengan cara pengawasan (Kunarjo, 2002:245).

Universitas Sam Ratulangi Manado merupakan salah satu universitas yang ada di Provinsi Sulawesi Utara sebagai institusi pendidikan tinggi yang senantiasa mengedepankan kualitas pendidikan baik sehingga lulusan-lulusan yang tercipta benar-benar mampu menjawab berbagai tantangan dan kebutuhan masyarakat. Untuk itu UNSRAT dengan visinya yakni : *menjadi Universitas yang Unggul dan Berbudaya dengan misi: terdepan dalam mengemban Tridharma Perguruan Tinggi dan sebagai Pusat Inovasi Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni-Budaya Guna Peningkatan Taraf dan Kualitas Kehidupan Masyarakat.*

Dalam menjawab visinya UNSRAT sebagai lembaga pendidikan yang mengedepankan kualitas tentunya membutuhkan dana untuk membiayai semua kegiatannya terutama dalam rangka pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi. Dana transfer yang dilakukan oleh pemerintah pusat untuk UNSRAT sangatlah membantu dalam proses perencanaan dan penganggaran. Berikut adalah estimasi pendapatan dan belanja UNSRAT tahun 2016-2020 :

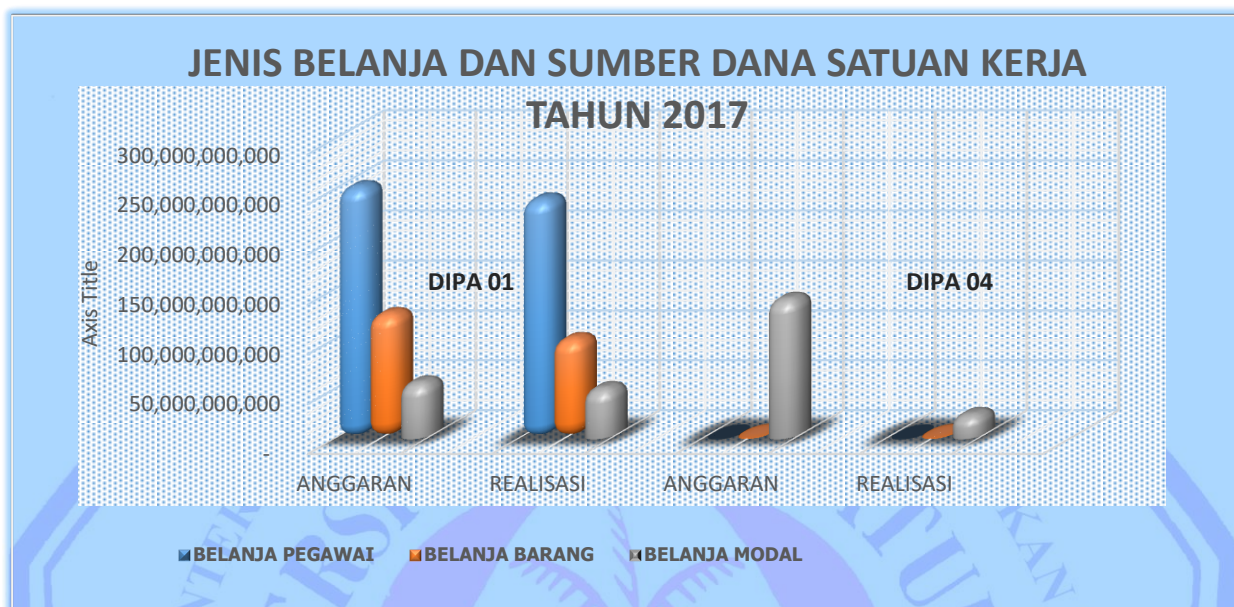
Tabel I.1
Estimasi Pendapatan dan Belanja UNSRAT Tahun 2016-2020

	Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
I	PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)					
1	Jasa layanan pendidikan	113,643,537,000	118,169,752,330	121,702,637,975	124,132,902,019	125,379,498,567
	PNBP Layanan Pendidikan	113,643,537,000	118,169,752,330	121,702,637,975	124,132,902,019	125,379,498,567
2	Hibah	0	0	0	0	0
	2a Hibah terkait	0	0	0	0	0
	2b Hibah tidak terkait	0	0	0	0	0
3	Generating Profit	0	0	0	0	0
	Jumlah PNBP	113,643,537,000	118,169,752,330	121,702,637,975	124,132,902,019	125,379,498,567
II	Rupiah Murni (RM)					
	RM (rupiah murni)	333,891,866,609	347,256,745,743	360,621,624,877	373,986,504,011	387,351,383,145
	jumlah Rupiah Murni	333,891,866,609	347,256,745,743	360,621,624,877	373,986,504,011	387,351,383,145
III	Pendapatan Luar Negeri					
	Fixed asset	0	0	0	0	0
	Non Fixed asset	0	0	0	0	0
	jumlah Pinjaman Luar Negeri	0	0	0	0	0
	Total Pendapatan	447,535,403,609	465,426,498,073	482,324,262,852	498,119,406,030	512,730,881,712
B	Belanja					
	Belanja pegawai	266,346,938,088	276,994,672,750	287,051,235,590	296,451,582,441	305,147,479,520
	belanja barang	105,271,766,690	109,480,209,435	113,454,995,646	117,170,417,072	120,607,409,646
	belanja modal	70,595,117,240	73,417,293,767	76,082,780,511	78,574,337,549	80,879,180,541
	belanja sosial	5,321,581,591	5,534,322,121	5,735,251,105	5,923,068,968	6,096,812,005
	total belanja	447,535,403,609	465,426,498,073	482,324,262,852	498,119,406,030	512,730,881,712

Sumber: RSB Unsrat 201

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat untuk estimasi pendapatan dan belanja UNSRAT untuk lima tahun kedepan cenderung mengalami peningkatan. Untuk estimasi pendapatan tahun 2016 adalah sebesar RP. 447.353.403.609 meningkat di tahun 2017 menjadi Rp.465,426,498,073 dimana sumber pendapatan terbesar dari dana pemerintah pusat yaitu rupiah murni (RM) sebesar Rp.333.891.866.609,- diikuti dana yang diperoleh dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp. 113.643.537.000,- sementara untuk dana yang berasal dari pinjaman luar negeri belum dialokasikan. Estimasi belanja tahun 2017 adalah sebesar Rp.465,426,498,073,- atau 100% dari jumlah pendapatan. Proporsi belanja terbesar adalah belanja pegawai diikuti oleh belanja barang dan belanja modal. Dapat juga dilihat pada grafik dibawah untuk jenis belanja dan sumber dana satuan kerja tahun 2017 UNSRAT:

Grafik 1.1
Jenis Belanja Dan Sumber Dana
Satuan Kerja Universitas Sam Ratulangi
Tahun 2017



Sumber : UNSRAT Dalam Angka 2017

Dapat dilihat pada grafik diatas untuk realisasi anggaran untuk jenis belanja diantaranya belanja pegawai bisa dilihat anggaran dan realisasi untuk tahun 2017 sudah sangat baik begitu. Untuk anggaran dan realisasi belanja barang untuk tahun 2017 masih belum memuaskan untuk penyerapan anggaran untuk belanja barang. Realisasi anggaran untuk belanja modal di tahun 2017 sudah sangat baik.

Persoalan-persoalan yang timbul dalam internal satuan kerja, seharusnya dapat diminimalisir apabila satuan kerja menerapkan pengelolaan manajemen yang efektif. Permasalahan yang dihadapi internal satuan kerja seperti: keterlambatan penetapan surat keputusan tenaga pengelola keuangan, tidak adanya *reward dan punishment*, dan kebiasaan menunda pekerjaan (Heriyanto, 2012).

Untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa perlu dibentuk Unit Layanan Pengadaan (ULP), sebagai penanggung jawab melaksanakan pengadaan barang dan jasa ditunjuk Pejabat Pembuat Komitmen(PPK). Adapun pihak yang terlibat dalam proses pengadaan barang dan jasa terdiri dari pejabat pengadaan, yaitu personil yang ditunjuk untuk melaksanakan pengadaan langsung dan pihak penyedia barang/jasa baik orang/perorangan ataupun badan usaha yang menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultasi/jasa lainnya. Seorang pejabat pengadaan harus memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa sebagai bukti pengakuan dari pemerintah atas kompetensi dan kemampuan profesi di bidang pengadaan barang/jasa.

Hasil penelitian Siswanto dan Rahayu (2010) menunjukkan keterlambatan proses pengadaan barang dan jasa disebabkan oleh a). Spesifikasi teknis barang/jasa tidak ada/tidak jelas; b). Buruknya proses pengadaan barang/jsa satuan kerja; c). Banyaknya sanggahan dalam proses lelang; d). Banyaknya pengaduan LSM mengenai pengadaan barang/jasa ke Polri dan Kejaksaan; e). Kurangnya sosialisasi mekanisme pengadaan barang/jasa; f). Kurangnya panitia pengadaan yang bersertifikat; g). Ketidakharmisan peraturan perundang-undangan terkait perencanaan, pelaksanaan, dan pencairan anggaran; h). Tidak seimbangny resiko pekerjaan dengan imbalan yang diterima oleh pejabat pelaksana pengadaan; i). Kehati-hatian pejabat pengadaan barang/jasa mengambil tindakan.

Dalam pencairan dana pengeluaran negara dikenal 2(dua) mekanisme pembayaran, yaitu mekanisme pembayaran langsung kepada pihak ketiga (LS) dan melalui Uang Persediaan (UP). Mekanisme LS menyalurkan pencairan dana dari Bendahara Umum Negara (BUN) kepada pihak ketiga sebagai penerima hak tagih kepada negara atas prestasi/kemajuan pekerjaan yang telah diselesaikan dari pemberi pekerjaan (Kementerian/satuan kerja (satker). Mekanisme UP yaitu melakukan pembayaran kepada penerima hak tagih melalui bendahara pengeluaran masing-masing satker. Dalam hal penggunaan mekanisme UP, bendahara pengeluaran terlebih dahulu mengajukan permintaan uang muka kerja (UP) kepada Kuasa BUN (KPPN).

Tinjauan Pustaka

Anggaran

Menurut Munandar (2007:11), “Anggaran yaitu suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan yang dinyatakan dalam unit kesatuan moneter yang berlaku untuk jangka periode tertentu yang akan datang”. Sedangkan Ikhsan (2009:173), memberikan pendapatnya mengenai anggaran :“Anggaran merupakan perencanaan manajerial untuk melakukan suatu tindakan dalam ungkapan-ungkapan keuangan. Anggaran merupakan istilah singkat dari perencanaan laba yang terpadu dan meliputi pilihan-pilihan manajemen dan tujuan-tujuan terhadap organisasi dan penyediaan dana sebagai salah satu acuan dalam menjalankan operasional sehari-hari”. Menurut Suharsimi (2010:1), “Anggaran yaitu suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan yang dinyatakan dalam unit kesatuan moneter yang berlaku untuk jangka waktu periode tertentu yang akan datang”

Sedangkan Nafarin (2013:11), mendefinisikan bahwa “Anggaran (budget) merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan dalam suatu uang, tetapi dapat juga dinyatakan dalam satuan barang/jasa” Sasongko dan Parulian (2015:2), berpendapat bahwa“Anggaran adalah rencana kegiatan yang akan dijalankan oleh manajemen dalam satu periode yang tertuang secara kuantitatif. Informasi yang dapat diperoleh dari anggaran di antaranya jumlah produk dan harga jualnya untuk tahun depan”.

Anggaran adalah suatu alat perencanaan dan pengendalian yang efektif di dalam organisasi, yang bersifat jangka pendek biasanya mencakup periode satu tahun (Anthony dan Govindarajan, 1998:360). Sedangkan Supriyono (1987) mengungkapkan bahwa anggaran adalah suatu rencana terinci yang dinyatakan secara formal dalam ukuran kuantitatif untuk menunjukkan bagaimana sumber- sumber akan diperoleh dan akan digunakan selama jangka waktu tertentu, umumnya satu tahun. Kegiatan penyusunan anggaran ini dinamakan penganggaran.

Anggaran memiliki dua peran penting di dalam sebuah organisasi, yaitu pertama berperan sebagai alat perencanaan dan kedua berperan sebagai alat pengendalian. Sebagai sebuah rencana tindakan, anggaran dapat digunakan sebagai alat untuk mengendalikan kegiatan organisasi atau unit organisasi dengan cara membandingkan hasil yang sesungguhnya yang dicapai dengan rencana yang telah ditetapkan. Jika hasil yang sesungguhnya yang dicapai dengan rencana yang telah ditetapkan. Jika hasil sesungguhnya berbeda secara signifikan dari rencana, tindakan tertentu harus diambil untuk melakukan revisi yang perlu terhadap rencana.

Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah meliputi rencana, pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode. Anggaran pemerintah merupakan dokumen formal hasil kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang belanja dan pendapatan yang diharapkan dapat menutup kebutuhan belanja atau pembiayaan yang diperlukan. Anggaran mengkoordinasikan aktivitas belanja pemerintah dan memberi landasan bagi upaya perolehan pendapatan dan pembiayaan untuk periode anggaran, yaitu periode tahunan.

Dalam pengertian lain dapat dikatakan bahwa anggaran sebagai sebuah rencana finansial yang menyatakan :

1. Rencana-rencana organisasi untuk melayani masyarakat atau aktivitas lain yang dapat mengembangkan kapasitas organisasi dalam pelayanan.
2. Estimasi besarnya biaya yang harus dikeluarkan dalam merealisasikan rencana tersebut.

3. Perkiraan sumber-sumber mana saja yang akan menghasilkan pemasukan serta seberapa besar pemasukan tersebut.

Sedangkan anggaran publik merupakan suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja, dan aktivitas (Nordian, 2006:48).

Anggaran publik merupakan suatu rencana finansial yang menyatakan:

1. Berapa biaya-biaya atas rencana yang dibuat (pengeluaran/biaya), dan
2. Berapa banyak dan bagaimana caranya memperoleh uang untuk mendanai rencana tersebut (pendapatan).

Uraian tersebut dapat dinyatakan bahwa anggaran sektor publik adalah perencanaan finansial tentang perkiraan pengeluaran dan penerimaan yang diharapkan akan terjadi di masa mendatang dengan melihat data yang diperoleh dari masa lalu sebagai acuan penetapan anggaran. (Mardiasmo, 2009:78) Selain itu, anggaran sektor publik memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut:

- a. Anggaran dinyatakan dalam satuan uang dan non-keuangan.
- b. Anggaran yang umumnya mencakup jangka waktu tertentu.
- c. Anggaran berisi komitmen atau kesanggupan manajemen untuk mencapai sasaran yang ditetapkan.
- d. Usulan anggaran ditelaah dan disetujui oleh pihak yang berwenang lebih tinggi dari penyusunan anggaran.
- e. Sekali disusun, anggaran hanya dapat diubah dalam kondisi tertentu

Perencanaan

Salah satu fungsi manajemen adalah perencanaan (planning). Perencanaan merupakan tindakan yang dibuat berdasarkan fakta dan asumsi mengenai gambaran kegiatan yang dilakukan pada waktu yang akan datang dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Perencanaan berarti menentukan sebelumnya kegiatan yang mungkin dapat dilakukan dan bagaimana cara melakukannya. Keberhasilan suatu kegiatan dalam pencapaian tujuannya yang efisien dan efektif ditentukan oleh adanya perencanaan yang matang, organisasi yang tepat, serta pengelolaan yang baik.

2. METODE PENELITIAN

Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian ini adalah Universitas Sam Ratulangi Manado Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2016. Bertujuan untuk mengetahui pengaruh perencanaan terhadap penerimaan anggaran, dengan periode waktu penelitian Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2016.

Metode Pengumpulan Data

Jenis data yang di kumpulkan dalam penelitian ini, terdiri dari data kuantitatif dengan metode sumber data sebagai berikut :

1. Data primer : Pengumpulan data meliputi buku-buku, internet, perpustakaan, serta dokumen yang relevan dengan penelitian.
2. Data sekunder : Badan Pusat Statistik (BPS) dan publikasi yang menyangkut penelitian penulis yang di terbitkan oleh Instansi/lembaga/organisasi profesi dan lain-lain.

Metode Analisis

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis table dan analisis kuantitatif berupa metode regresi linear berganda dan uji asumsi klasik. Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan program *Microsoft Excel 2013* dan *Eviews 0.8*.

Analisis Regresi Berganda

Dalam hal untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan sebelumnya, maka peneliti menggunakan analisis linear berganda. Analisis regresi berganda merupakan studi ketergantungan dari satu variabel yang disebut variabel tidak bebas (*dependent variable*), pada satu atau lebih variabel, yaitu variabel yang menerangkan, dengan tujuan untuk memperkirakan dan atau meramalkan nilai rata-rata dari variabel tidak bebas apabila nilai variabel yang menerangkan sudah diketahui. Variabel yang menerangkan sering disebut variabel bebas (*independent variable*). Model analisis regresi berganda sebagai berikut:

$$Y = f(X_1, X_2, X_3)$$

Kemudian dibentuk dalam model ekonometrika dengan persamaan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Dimana:

Y	= Anggaran DIPA
X ₁	= Belanja Pegawai
X ₂	= Belanja Barang
X ₃	= Belanja Modal
α	= Konstanta/ Intercept
β	= Koefisien Regresi
e	= Standar Error

Metode kuadrat terkecil/*Ordinary least square* merupakan estimasi titik sampel, karena itu masalah verifikasi estimasi titik tersebut melalui interal estimasi maupun uji hipotesis melalui uji t. dengan menggunakan table distribusi t kita mendapatkan nilai t kritis (t_c) dengan signifikansi $t_{\alpha/2}$ dan df (*degree of freedom*) $n-k$ dimana n adalah jumlah observasi dan k adalah jumlah parameter estimasi termasuk konstanta. (Widarjono, 2016 : 59).

Didalam hasil perhitungan regresi berganda analisis korelasi bertujuan untuk mengukur kuatnya tingkat hubungan linear antara dua variabel. Untuk mengukur kuatnya hubungan (korelasi) antara dua variabel X diberi symbol r_{xy} atau r saja. Nilai letaknya antara -1 dan 1, nilai $r = 1$, berarti hubungan X dan Y sempurna dan positif. Nilai $r = 0$, berarti hubungan X dan Y lemah sekali atau tidak ada hubungan. Kalau tidak ada hubungan, naik turunnya X tidak dipengaruhi Y, sedangkan, kalau hubungannya positif, pada umumnya kenaikan (penurunan) X, menyebabkan kenaikan (penurunan) Y, sebaliknya untuk hubungan yang negative pada umumnya kenaikan (penurunan) X menyebabkan penurunan (kenaikan) Y. (Widarjono, 2013 : 7).

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Untuk mendapatkan hasil regresi antar variabel independen dengan variabel dependen maka digunakan data sekunder yang bersumber dari Universitas Sam Ratulangi Manado Tahun 2009- 2017. Data sekunder tersebut diestimasi dengan metode OLS (*Ordinary Least Square*) analisis regresi berganda sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, dan diolah menggunakan program SPSS 18.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas Data

Uji normalitas adalah pengujian tentang kenormalan distribusi data. Penggunaan uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel dependen dan independen keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. (Ghozali, 2006). Untuk uji *Kolmogorov Smirnov* membandingkan antara nilai signifikansi perhitungan (Asymp Sig 2-tailed) dengan nilai keyakinan 0.05.

Apabila nilai signifikansi > 0,05 maka normalitas terpenuhi. Berikut hasil uji normalitas data dengan menggunakan aplikasi SPSS:

Tabel 1
Uji Normalitas Data
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		9
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	-,0000160
	Std. Deviation	6,89048348E9
Most Extreme Differences	Absolute	,206
	Positive	,206
	Negative	-,129
Kolmogorov-Smirnov Z		,619
Asymp. Sig. (2-tailed)		,838

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber : Hasil Olah SPSS

Berdasarkan nilai "Asymp. Sig. (2-tailed) diatas, diketahui bahwa nilai signifikansi sebesar 0.838 lebih besar dari 0.05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang kita uji terdistribusi secara normal.

Uji Multikolinieritas

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal (Ghozali 2007:91). Untuk mendeteksi adanya multikolinieritas, dapat dilihat dari *Value Inflation Factor (VIF)* dan nilai *tolerance*. Apabila nilai VIF > 10 dan tolerance < 0,1 maka terjadi multikolinieritas. Sebaliknya, jika VIF < 10 dan tolerance > 0,1, tidak terjadi multikolinieritas (Wijaya, 2009:119). Hasil pengujian terhadap variabel penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2
Uji Multikolinieritas
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	2,186E10	1,604E10		1,363	,231		
	X1	,818	,096	,330	8,508	,000	,505	1,981
	X2	1,165	,134	,273	8,678	,000	,766	1,305
	X3	1,035	,070	,576	14,870	,000	,506	1,975

a. Dependent Variable: Y

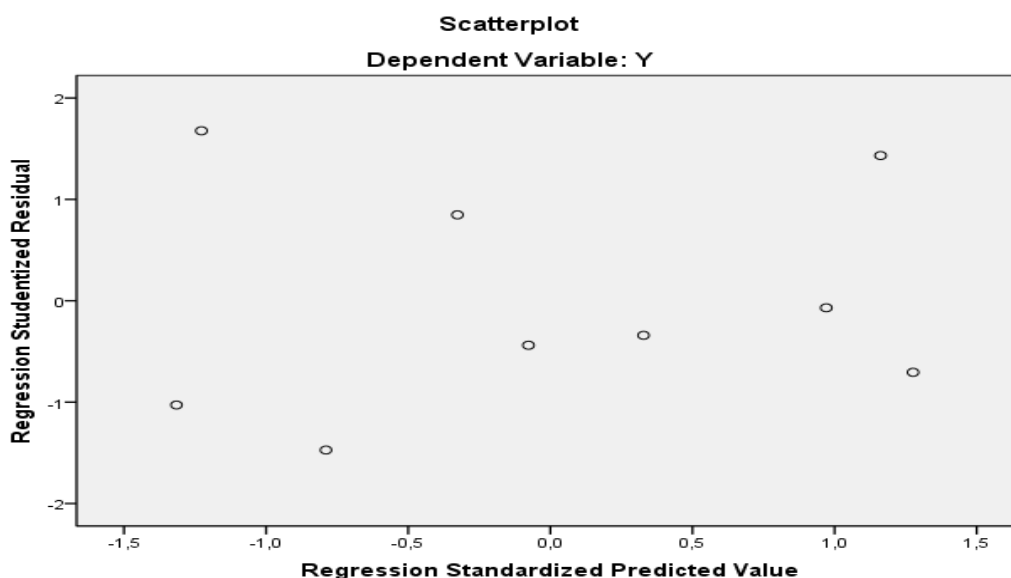
Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS

Berdasarkan output diatas diketahui bahwa nilai *Tolerance* variabel Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal lebih besar dari 0,10. Sementara itu, nilai VIF variabel Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal lebih kecil dari 10,00. Sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinieritas.

Uji Heterokedastisitas

Pengujian heterokedastisitas dimaksudkan untuk mengetahui kesamaan varian masing-masing variabel independen X1 dan X2 terhadap variabel terikat (Y). Pengujian uji heterokedastisitas menggunakan uji *scatterplots* hasilnya sebagai berikut.

**Grafik 1
Uji Heterokedastisitas**



Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS

Berdasarkan output *Scatterplots* diatas, terlihat bahwa titik-titik menyebar dan tidak membentuk suatu pola tertentu yang jelas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heterokedastisitas.

Uji Autokorelasi

Banyak metode yang bisa digunakan untuk mendeteksi masalah autokorelasi. Salah satu uji yang populer digunakan dalam ekonometrika adalah metode yang dikemukakan oleh Durbin-Watson (d)².

**Tabel 3
Uji Autokorelasi
Model Summary^b**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,998 ^a	,996	,994	8,716E9	2,416

a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1

b. Dependent Variable: Y

Sumber : Hasil Olah SPSS

Hasil analisis uji autokorelasi menunjukkan bahwa nilai Durbin-Watson (d) adalah sebesar 2.416. Untuk menguji ada tidaknya autokorelasi dalam model, maka dilakukan perbandingan dengan nilai Durbin-Watson pada table. Dengan jumlah variabel bebas (k)= 3 dan jumlah sampel (n)= 9 pada $\alpha=5\%$ maka di peroleh nilai d_U sebesar 2.1282. Nilai DW 2.416 lebih besar dari batas atas (d_U) yakni 2.1282 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah autokorelasi.

Regresi Berganda

Berikut ini merupakan hasil olah data dengan menggunakan SPSS untuk mengetahui pengaruh antara variabel DIPA (Y1) (variabel dependen) dengan Belanja Pegawai (X1), Belanja Barang (X2) dan Barang Modal (X3) (variabel independen). Hasil regresi tersebut dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut :

$$Y_1 = a_1X_1 + a_2X_2 + a_3X_3$$

$$DIPA_{Y1} = 0.030(BP_{X1}) + 0.273 (BB_{X2}) + 0.576 (BM_{X3})$$

Tabel 4
Hasil Estimasi Regresi Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	2,186E10	1,604E10		1,363	,231
X1	,818	,096	,330	8,508	,000
X2	1,165	,134	,273	8,678	,000
X3	1,035	,070	,576	14,870	,000

a. Dependent Variable: Y

Hasil estimasi belanja pegawai (X₁) pada tabel 4.4 menunjukkan bahwa variabel belanja pegawai (X₁) berpengaruh positif dan signifikan terhadap anggaran DIPA (Y). Nilai signifikansi sebesar 0.000 lebih kecil dari nilai α = 1%, atau 0.000<0.01, maka H₁ diterima dan H₀ ditolak. Variabel belanja pegawai (X₁) mempunyai t_{hitung} yakni 8.508 dengan t_{tabel} = 3.14267. jadi t_{hitung} > t_{tabel} dapat disimpulkan bahwa variabel belanja pegawai (X₁) memiliki kontribusi terhadap variabel anggaran DIPA (Y). Nilai t positif menunjukkan bahwa belanja pegawai (X₁) mempunyai hubungan yang searah dengan anggaran DIPA (Y). Jadi disimpulkan belanja pegawai memiliki pengaruh signifikan terhadap anggaran DIPA.

Hasil estimasi belanja barang (X₂) pada tabel 4.4 menunjukkan bahwa variabel belanja barang (X₂) berpengaruh positif dan signifikan terhadap anggaran DIPA (Y). Nilai signifikansi sebesar 0.000 lebih kecil dari nilai α = 1%, atau 0.000<0.01, maka H₁ diterima dan H₀ ditolak. Variabel belanja barang (X₂) mempunyai t_{hitung} yakni 8,678 dengan t_{tabel} = 3.14267. jadi t_{hitung} > t_{tabel} dapat disimpulkan bahwa variabel belanja barang (X₂) memiliki kontribusi terhadap variabel anggaran DIPA (Y). Nilai t positif menunjukkan bahwa belanja barang (X₂) mempunyai hubungan yang searah dengan anggaran DIPA (Y). Jadi disimpulkan belanja barang memiliki pengaruh signifikan terhadap anggaran DIPA.

Hasil estimasi belanja modal (X₃) pada tabel 4.4 menunjukkan bahwa variabel belanja modal (X₃) berpengaruh positif dan signifikan terhadap anggaran DIPA (Y). Nilai signifikansi sebesar 0.000 lebih kecil dari nilai α = 1%, atau 0.000<0.01, maka H₁ diterima dan H₀ ditolak. Variabel belanja modal (X₃) mempunyai t_{hitung} yakni 14,870 dengan t_{tabel} = 3.14267. jadi t_{hitung} > t_{tabel} dapat disimpulkan bahwa variabel belanja modal (X₃) memiliki kontribusi terhadap variabel anggaran DIPA (Y). Nilai t positif menunjukkan bahwa belanja modal (X₃) mempunyai hubungan yang searah dengan anggaran DIPA (Y). Jadi disimpulkan modal barang memiliki pengaruh signifikan terhadap anggaran DIPA.

Tabel 5
Uji F
ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	9,957E22	3	3,319E22	436,921	,000 ^a
	Residual	3,798E20	5	7,597E19		
	Total	9,995E22	8			

a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1

b. Dependent Variable: Y

Nilai F hitung sebesar 436.921 dengan signifikansi 0.000. Nilai F table 5% dengan nilai f table 5.41. Nilai F hitung sebesar $436.921 > F$ table sebesar 5.41. Berdasarkan hasil Uji F maka variable bebas belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal memiliki pengaruh terhadap anggaran DIPA sebagai variable terikat.

Tabel 6
Uji Determinan R- Square
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,998 ^a	,996	,994	8,71585E9

a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1

Dari nilai Adjusted R Square menunjukkan nilai sebesar $0.996 = 99.6\%$. Artinya, bahwa variable anggaran DIPA yang dapat dijelaskan dengan menggunakan variable belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal adalah sebesar 99.6% dan sisanya 0.4% di pengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar model.

Pembahasan

Hasil estimasi menunjukkan bahwa variabel belanja pegawai berpengaruh positif dan signifikan terhadap anggaran DIPA dapat disimpulkan bahwa variabel belanja pegawai memiliki kontribusi terhadap variabel anggaran DIPA. Nilai positif menunjukkan bahwa belanja pegawai mempunyai hubungan yang searah dengan anggaran DIPA. Jadi belanja pegawai memiliki pengaruh signifikan terhadap anggaran DIPA. Hal ini sesuai dengan teori yang menyatakan adanya hubungan positif dan searah antara belanja pegawai dengan penyerapan anggaran DIPA. Hasil ini menunjukkan bahwa perencanaan anggaran untuk belanja pegawai di kalangan Universitas Sam Ratulangi berjalan dengan sangat baik atau sejalan dengan penyerapan anggaran DIPA. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ida Ayu Dkk (2018) menyatakan bahwa perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran dan pengawasan intern berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran.

Hasil estimasi menunjukkan bahwa variabel belanja barang berpengaruh positif dan signifikan terhadap anggaran DIPA dapat disimpulkan bahwa variabel belanja barang memiliki kontribusi terhadap variabel anggaran DIPA. Nilai positif menunjukkan bahwa belanja barang mempunyai hubungan yang searah dengan anggaran DIPA. Hal ini sesuai dengan teori yang menyatakan adanya hubungan positif dan searah antara belanja barang dengan penyerapan anggaran DIPA. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan yang dilakukan untuk belanja barang di kalangan Universitas Sam Ratungilangi Manado sudah sangat baik dan sejalan dengan penyerapan anggaran DIPA. Penelitian yang dilakukan oleh Kadek Mia Dkk (2017) menyatakan bahwa perencanaan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran di SKPD Provinsi Bali.

Hasil estimasi menunjukkan bahwa variabel belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap anggaran DIPA dapat disimpulkan bahwa variabel belanja modal memiliki kontribusi terhadap variabel anggaran DIPA. Nilai positif menunjukkan bahwa belanja modal mempunyai hubungan yang searah dengan anggaran DIPA. Hal ini sesuai dengan teori yang menyatakan adanya hubungan positif dan searah antara belanja modal dengan penyerapan anggaran DIPA. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan yang dilakukan untuk belanja modal di kalangan Universitas Sam Ratungilangi Manado sudah sangat baik dan sejalan dengan penyerapan anggaran DIPA. Penelitian yang dilakukan oleh Kadek Mia Dkk (2017) menyatakan bahwa perencanaan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran di SKPD Provinsi Bali.

Kebijakan Umum Universitas Sam Ratulangi Manado

Kebijakan umum pengembangan disusun untuk memberikan arah pedoman bagi penyelenggaraan pendidikan di UNSRAT terkait dengan cara yang diperlukan untuk mencapai visi dan

misi melalui sasaran strategis yang menggambarkan tujuan strategis. Kebijakan umum pengembangan UNSRAT dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan program tri-dharma.
2. Pengembangan wadah pendidikan tinggi yang inovatif dan berorientasi pada kearifan lokal .
3. Pengembangan kemitraan dan kerjasama untuk meningkatkan akses dan kesejahteraan pemangku kepentingan.
4. Peningkatan status fungsi kelembagaan yang otonom dan akuntabel untuk menjadi instansi mandiri.

4. PENUTUP

Kesimpulan

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anggaran belanja pegawai berpengaruh positif dan signifikan secara statistik terhadap penyerapan anggaran DIPA.
2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anggaran belanja barang berpengaruh positif dan signifikan secara statistik terhadap penyerapan anggaran DIPA
3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anggaran belanja modal berpengaruh positif dan signifikan secara statistik terhadap penyerapan anggaran DIPA

Saran

1. Dalam penggunaan anggaran dari pemerintah pusat khususnya anggaran DIPA di UNSRAT diharapkan lebih baik lagi dalam pengelolaan untuk pos belanja pegawai, agar perencanaan yang dilakukan sejalan dengan kinerja yang dihasilkan yang nanti lebih meningkatkan mutu UNSRAT yang lebih baik lagi
2. Begitu juga dalam pengelolaan anggaran untuk pos belanja barang diharapkan sesuai dengan keperluan yang dibutuhkan UNSRAT.
3. Untuk perencanaan anggaran dalam pos belanja modal diharapkan akan lebih baik lagi agar sejalan dengan anggaran yang diberikan oleh pemerintah pusat yang nantinya dapat membantu peningkatan mutu UNSRAT.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisaputro, Gunawan dan Marwan Asri. 2003.** Anggaran Perusahaan. Edisi 3, Yogyakarta: BPFE UGM
- Agus, Widarjono.** Ekonometrika. Yogyakarta: UPP STIM YKPN. 2013
- Agus, Widarjono.** Ekonometrika. Yogyakarta: UPP STIM YKPN. 2016
- Ghozali, Imam, 2006,** Structural Equation Modeling Metode Alternatif dengan Partial Least Square, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang
- Heriyanto, Hendris,** “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keterlambatan Penyerapan Anggaran Belanja pada Satuan Kerja Kementerian/ Lembaga di Wilayah Jakarta”, tesis, tidak diterbitkan (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2012).
- Hansen & Mowen. 2004.** Manajemen Biaya, Edisi Bahasa Indonesia. Buku Kedua. Jakarta: Salemba Empat
- Kunarjo. 2001.** Defisit Anggaran Negara. Majalah Perencanaan Pembangunan. Edisi 23.
- Kunarjo (2002),** *Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan*, UI press, Jakarta

- Munandar, M. 2010.** Budgeting Perencanaan Kerja Pengkoordinasian Kerja Pengawasan Kerja. Yogyakarta : BPFE.
- Mardiasmo, 2009,** Perpajakan. Edisi Revisi 2009. Yogyakarta : Penerbit Andi
- Miliasih, Retno. 2012.** Analisis Keterlambatan Penyerapan Anggaran Belanja Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga tahun 2010 di Wilayah Kerja Pembayaran KPPN Pekanbaru. Tesis (tidak dipublikasikan). Jakarta: FEUI.
- Nafarin, M. 2010.** Penganggaran Perusahaan. Jakarta : Salemba Empat
- Supriyono. 1987.** Akuntansi Biaya: Pengumpulan Biaya dan Penentuan Harga Pokok Produk. Edisi Kedua. Yogyakarta: BPFE Universitas Gajah Mada.
- Septianova, R., dan Helmy, A. 2013.** Pengaruh Kualitas DPA dan Akurasi Perencanaan Kas Terhadap Kualitas Penyerapan Anggaran pada Satker Wilayah KPPN Malang. JRAK. Vol.4 No. 1 Hm. 75-84.
- Siswanto, A. D., & Rahayu, S. L. (2010).** Faktor-faktor penyebab rendahnya penyerapan belanja kementerian/lembaga TA 2010. Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan. Jakarta. Diunduh dari http://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/artikel_dan_opini/Kementerian_lembaga.pdf

